

**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH,
PENGENDALIAN AKUNTANSI, KETAATAN PADA
PERATURAN PERUNDANGAN DAN SISTEM
PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
(Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Rokan Hilir)**

Oleh :

Chaira Astami Putri Br. Butar-Butar

Pembimbing : Yesi Mutia Basri dan Al Azhar A

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : chairaastamiputri9@gmail.com

*Effect of Local Government Accounting System, Accounting Control, Obedience to Laws
Regulation Against Accountability and Reporting Systems of Government Institution
Performance (AKIP)
(Empirical Study On Government OPD Rokan Hilir)*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the application of local government accounting systems, accounting controls, compliance with legislation on the performance of government accountability rokan downstream. The population in this research is 28 units of Rokan Hilir work. Samples taken as many as 127 respondents. The type of data used is primary data with data collection method using questionnaire. Data analysis method used in this research is multiple regression. The result of the research shows that the independent variable in this research is the accounting system of local government partially have influence of significance to accountability of government institution performance, partial accounting control also have influence of significance to accountant performance of government institution, obedience to regulation and reporting system by partial have influence significance to the performance accountability of government agencies

Keywords : Local Government Accounting System, Accounting Controls, Obedience to Laws Regulation Against Accountability and Reporting Systems of Government Institutions.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan pertanggung jawaban atas lembaga-lembaga publik baik pusat maupun daerah, tuntutan akuntabel tersebut merupakan perbaikan akuntabilitas kinerja yang berdampak pada upaya terciptanya *good governance*.

Terselenggaranya *good governance* adalah cara untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Dari cita-cita tersebut dibutuhkanlah suatu upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan efektif, dimana penerapan sistem tersebut untuk mewujudkan

penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Akuntabilitas diharapkan mampu meningkatkan pelayanan umum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah yang merupakan bagian aspek penting dalam kebijakan otonomi daerah serta mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Publik akan memberikan dukungan dan bantuan untuk pemerintah yang terus menyuarakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ada kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Dipihak penyelenggara pemerintahan, akuntabilitas ialah suatu sikap yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik. Dalam konteksnya sebagai organisasi yang bergerak dibidang jasa pelayanan publik, pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik.

Perkembangan di Indonesia, reformasi pengelolaan keuangan negara telah memasuki era transparansi dan akuntabilitas sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah membuat laporan keuangan dalam setiap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/D kepada DPR/D. Laporan keuangan yang dimaksud adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam konteks ini, sasaran

pengukuran akuntabilitas kinerja adalah keuangan dan *non* keuangan (BPKP, 2007). Akuntabilitas publik yang sesuai dengan karakteristik *good governance* akan berkenaan dengan (1) partisipasi (*participation*), (2) taat pada aturan hukum (*rule of law*); (3) transparansi(*transparency*), (4) responsif (*responsiveness*), (5) orientasi konsensus (*consensus orientation*), (6) keadilan (*equity*) (7) efektif dan efisien (*effectiveness and efficiency*), dan (8) visi strategis (*strategy vision*) (Mardiasmo, 2009).

Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/ kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang diduga mempengaruhi akuntabilitas kinerja dan akan diteliti kembali adalah penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan dan sistem pelaporan.

Adapun objek penelitian yang dipilih adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Dalam hal ini BPK RI tahun 2016 memberikan pernyataan dan meminta kepada DPRD dan juga

Bupati/Walikota untuk segera menindaklanjuti dan memperbaiki peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah, khususnya memberikan perhatian pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang masih mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu pengecualian untuk nilai asset tetap dan nilai penyusutan asset tetap. Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK mengungkapkan adanya permasalahan-permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam hasil pembahasan panjang ditemukan juga kelemahan yang perlu disempurnakan seperti :

1. penyampaian LKPJ agar tepat waktu
2. pemda juga harus lebih teliti terhadap peraturan perundang - undangan serta mengetahui segala bentuk perubahannya agar setiap laporan yang disampaikan telah dilakukan dengan penyesuaian perubahan atau ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dimana menyampaikan LKPJ harus menggunakan data-data baru atau data tahun berkenaan
3. Mengikut sertakan data ekonomi makro mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat kemiskinan dan indeks pengangguran dalam LKPJ

Dari hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2016, nilai akuntabilitas Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2016 yaitu Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi (MENPAN & RB) mendapatkan nilai 37,50 dimana

termasuk dalam predikat C (Agak Kurang).

Penelitian ini pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Lumenta (2016) serta mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Anjarwati (2012) tentang pengendalian akuntansi dan Paramitha (2016) tentang Sistem Pelaporan. Namun ada beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya (Lumenta, 2016) adalah : Objek yang digunakan sebagai tempat penelitian, variabel yang digunakan dan alasan diteliti ulang oleh peneliti karena terdapat perubahan Undang-Undang yang diterapkan Pemerintah sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah yang dilaksanakan paling lambat tahun anggaran 2015 dalam Bab 8 pasal 10 ayat (2).

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris :

1. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)?
2. Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)?
3. Ketaatan Pada Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)?
4. Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap

Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP)?

TELAAH PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan akan terjadi pada bagian organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan dan berfokus pada persoalan ketimpangan/asimetri informasi antara pengelola (pemerintah) dan publik (dewan). Prinsipal harus memonitor kerja agen, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisiensi serta tercapainya akuntabilitas publik (Emrinaldi, 2012). Menurut (Mardiasmo 2009:20) Akuntabilitas Publik adalah Kewajiban seorang pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan informasi, pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut SK Kepala LAN no.239/IX/6/8/2003 bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan

tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik.

Variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diukur melalui dua indikator yaitu perencanaan strategik yang terdiri dari tujuan perencanaan dan sasaran strategik dan indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari masukan (*input*), keluaran (*output*) hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dampak (*impact*)

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Dalam Kepmendagri No.13 tahun 2016, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Tujuan penetapan sistem akuntansi pemerintah daerah adalah untuk mewujudkan fungsi analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan pemerintah yang laporan keuangan tersebut akan menghasilkan informasi dalam mengukur kinerja sehingga dapat membantu mewujudkan akuntabilitas kinerjanya.

Variabel SAPD diukur dengan dengan 4 indikator yaitu 1) Akuntabilitas, 2) Manajemen, dan 3) Transparansi dan 4) Keseimbangan Antar Generasi.

Pengendalian Akuntansi

Menurut Herry (2009) Pengendalian atau kontrol akuntansi (*accounting control*) adalah prosedur dan dokumentasi yang terkait untuk pengamanan aset, melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan dan memastikan keandalan catatan keuangan. Suatu anggaran walaupun telah disusun secara komprehensif dan rinci seriat melalui penyusunan yang akurat, biasanya pada saat pelaksanaan anggaran tersebut sering mengalami berbagai kendala atau hal-hal yang tidak diperhatikan sebelumnya. Untuk mengetahui dan menghindari penyimpangan tersebut maka diperlukan peran pengendalian akuntansi (Darma,2004). Dengan adanya pengendalian tersebut akan dapat mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang ada. Pengendalian mempunyai tujuan umum yaitu mengendalikan harta perusahaan.

Pernyataan ini di ukur dengan menggunakan tiga indikator variabel yaitu: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Ketaatan Pada Peraturan Perundangan

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Tujuan undang-undang dan peraturan negara adalah untuk mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan undang-undang atau peraturan, kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih tertib (Soleman:2007). Menurut Bastian (2010:33) Ketaatan pada peraturan perundangan adalah

kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sistem hukum yang dianut Indonesia dalam sistem akuntansi sector publik adalah sistem *civil law*, dimana setiap aturan yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik yang dimuat dalam bentuk peraturan perundangan. Dilihat lebih jauh perlu dipahami materi teroi dalam rangka pembuatan peraturan perundangan. Dihubungkan dengan syarat dalam hal pembentukan akuntansi pemerintah sesuai dengan karakteristik dan bertujuan untuk memenuhi akuntabilitas keuangan Bastian (2006 : 42) memberikan gambaran mengenai tujuan pemerintah dan akuntansi pemerintah menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai tujuan secara umum yaitu mensejahterakan rakyat

Variabel ketaatan pada peraturan perundangan diukur dengan menggunakan dua indikator, yaitu Kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan hemat dan efisiensi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan menurut Bastian (2006) dalam Pamungkas (2012).

Sistem Pelaporan

Menurut Bastian (2010:297) Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktifitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. PP No.71 tahun 2010 mengamanatkan pemerintah daerah wajib

menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran OPD dilaksanakan secara periodik yang terdiri dari LRA OPD, neraca OPD, LAK OPD, LO OPD, Laporan Estimasi Perubahan SAL, LPE dan CaLK OPD.

Jadi, sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Halim, 2013) dengan 3 indikator yaitu: penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil dan lamanya waktu koreksi.

Variabel sistem pelaporan ini diukur dengan menggunakan delapan indikator variabel, yaitu penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil, dan lamanya waktu koreksi.

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Apabila sistem akuntansi pemerintah daerah dilakukan secara efektif dan koefisien dalam menyajikan laporan keuangan, maka pertanggungjawaban atas laporan keuangan akan menjadi baik sesuai yang telah ditentukan, secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan evaluasi penerapan

sistem akuntansi pemerintah daerah dalam rangka mencari dan mengatasi hambatan dan kendala yang mungkin timbul dalam proses pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam rangka mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Eddy Supriadi (2007). Semakin baik penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah maka Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga semakin baik.

Hasil penelitian yang mendukung tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja dilakukan oleh Lumenta (2016) dan Putra (2015) yang berhasil membuktikan bahwa secara simultan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.

H1 : Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengendalian akuntansi (*accounting control*) adalah prosedur dan dokumentasi yang terkait untuk pengamanan aset, melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan dan memastikan keandalan catatan keuangan (Hery, 2009). Penggunaan sistem pengendalian akuntansi dapat mempermudah perencanaan dan pengawasan kegiatan dan kinerja organisasi. Sistem akuntansi merupakan bagian yang sangat penting dalam spektrum mekanisme pengendalian keseluruhan yang digunakan untuk memotivasi, mengukur, dan memberi sanksi tindakan-tindakan manajer

dan karyawan dari suatu organisasi serta mengambil keputusan yang sesuai dengan rencana.

Variabel ini berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada penelitian terdahulu yang dilakukan Setiawan (2013) dan Wahyuni (2014).

H2 : Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Solihin (2007:16) mengemukakan bahwa untuk pelaksanaan penerapan akuntabilitas sendiri haruslah didukung oleh peraturan perundangan yang memadai dan ketaatan pelaksanaan kelembagaan seperti penerapan reward system dan punishment secara konsisten dan memperbaiki format laporan akuntabilitas. Ini menunjukkan bahwa ketaatan terhadap peraturan perundangan pun akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Aparat publik diwajibkan untuk menaati peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga para semua aparatur negara bekerja berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam konteks ini, undang-undang formal yang material adalah undang-undang yang dibentuk atas persetujuan DPR dan disahkan oleh Presiden, yang isinya mengikat Rakyat. Di Indonesia, peraturan perundangan tentang keuangan negara diatur dalam UUD 1945, Undang-undang (UU), keputusan

presiden (Keppres), dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurazlina (2011) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang positif atas ketaatan terhadap peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Zirman (2010).

H3 : Ketaatan Pada Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas, entitas yang mempunyai kewajiban dalam membuat pelaporan kinerja adalah pemerintah daerah, pemerintah pusat, unit kerja pemerintah dan unit pelaksana teknis. Pelaporan tersebut diserahkan kepada dewan perwakilan rakyat sehingga laporan tersebut bias diterima informasinya oleh publik Bastian (2002:303).

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Sistem pelaporan juga menggambarkan tingkat pencapaian kinerja atau pertanggungjawaban kinerja pemerintah.

Variabel ini dinyatakan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Paramitha (2016).

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Rokan Hilir, yang berjumlah 28 OPD. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel pada penelitian ini yaitu Pengguna Anggaran OPD, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Keuangan, Bendahara dan PPTK. Sehingga responden keseluruhan berjumlah 127 orang.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner berisi pernyataan dan atau pertanyaan yang harus diisi oleh responden yang menggunakan lima skala Likert. Sebagai berikut: 5= Sangat Setuju, 4= Setuju, 3= Netral, 2= Tidak Setuju, 1= Sangat Tidak Setuju. Alasan pemilihan responden tersebut adalah responden tersebut merupakan orang yang paham mengenai pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah serta mengerti akan pengelolaan keuangan.

Statistik deskriptif variabel dan Metode analisis data dalam penelitian ini meliputi uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas data, uji multikolinearilitas, heteroskedastisitas, uji autokorelasi), analisis statistik deskriptif, analisis regresi berganda, dan uji t untuk menguji tiap-tiap hipotesis.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan dan sistem pelaporan sebagai variabel independen dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai variabel dependen yang disajikan dalam tabel *descriptive statistics*. Tabel *descriptive statistics* menunjukkan angka minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi dari penyebaran data hasil rekap kuisisioner yang dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1
Statistik deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 2 7	19	35	26,21	3,311
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	1 2 7	21	40	30,54	4,017
Pengendalian Akuntansi	1 2 7	8	20	15,08	2,125
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	1 2 7	11	20	15,58	2,307
Sistem Pelaporan	1 2 7	8	20	15,52	2,185
Valid N (listwise)	1 2 7				

Sumber : Data Olahan, 2017

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai *r* hitung dengan *r* tabel untuk *degree of freedom* ($df = n-2$) dengan $\alpha 0,05$, *n* adalah jumlah sampel (Sugiyono, 2014:203) Dalam penelitian ini $df=127-2=125$, sehingga didapat *r* tabel untuk $df (54) = 0,174$.

Hasil Uji Validitas Variabel

Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan Correlation

Coefficients Pearson diatas, dapat disimpulkan seluruh item pertanyaan baik pada variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1), Pengendalian Akuntansi (X2), Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3), Sistem Pelaporan (X4) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat bahwa semua item pertanyaan baik pada variabel independen maupun dependen bernilai $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Uji Reliabilitas

Tabel 2
Uji Reliabilitas Variabel

Variabel	Cronbach's Alpha	Standart reliabilitas	keterangan
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	0.870	0,60	Reliabl e
Pengendalian Akuntansi	0.762	0,60	Reliabl e
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	0.773	0,60	Reliabl e
Sistem Pelaporan	0.821	0,60	Reliabl e
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0.815	0,60	Reliabl e

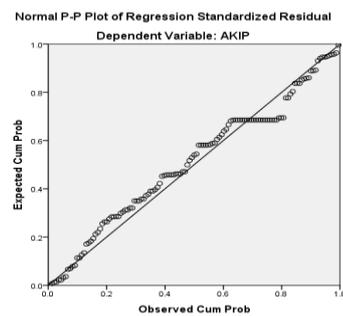
Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas di atas terlihat bahwa seluruh instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur keseluruhan variabel yang diteliti dalam penelitian ini dinyatakan valid dan reliabel, sehingga data yang dihasilkan dari instrumen pernyataan dalam penelitian ini berkualitas dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Hasil uji normalitas data

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan SPSS 20.0, terlihat data menyebar disekitar dan mengikuti garis diagonal. Dapat diartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas

Gambar 1



Sumber : Data Olahan, 2017

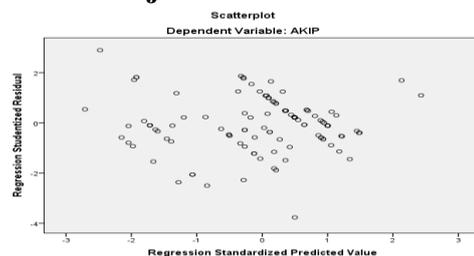
Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas, diperoleh bahwa untuk setiap variabel independennya memiliki nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak mengalami gangguan mul-tikolinieritas.

Hasil Uji heteroskedastisitas

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan gambar diatas dari hasil uji heteroskedastisitas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heterokedastisitas.

Hasil uji Autokorelasi

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa nilai Durbin Watson 2,046 lebih besar dari 1,776 dan

lebih kecil dari 2,224. Artinya tidak terjadi masalah autokorelasi pada model yang dibangun.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil perhitungan, maka didapatkan persamaan regresi linier berganda :

$$AKIP = 2,797 + 0,255SAPD + 0,451PA + 0,213KPPP + 0,355SP + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diketahui t hitung (3,709) > t tabel (1,980) dan Sig. (0,00) < 0,05.

Penggunaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan bertujuan agar suatu institusi tertib administrasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dayanya tersebut, oleh karena itulah sistem akuntansi menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi tiap pemda. Dengan adanya Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah tersebut memungkinkan adanya perlakuan akuntansi yang seragam dan konsisten sehingga mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan akan semakin meningkat.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses

pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer dalam Kepmendagri No.13 tahun 2016. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa terdapat pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Rokan Hilir.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Putra (2015) dan Lumenta (2016) yang berhasil membuktikan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari hasil perhitungan SPSS 20.0 *for windows*, diperoleh nilai t hitung (4,324) > t tabel (1,980) dan Sig. (0,013) < 0,05.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan hipotesis 2 diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengendalian Akuntansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah berperan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahnya. Menurut (Mulyadi, 2008) Pengendalian akuntansi mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk

mengukur prestasi pelaksanaan kegiatan. Menurut Agoes (2012:100) “Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektifitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan hipotesis 2 diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengendalian Akuntansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah berperan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahnya.

Semakin baik sistem pengendalian akuntansi maka akan dapat mempermudah perencanaan dan pengawasan, hal ini juga dapat untuk pengendalian keseluruhan yang digunakan untuk memotivasi, mengukur, dan memberi sanksi tindakan-tindakan manajer dan karyawan dari suatu organisasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Setiawan (2013) yang menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Wahyuni (2014).

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga.

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari hasil perhitungan SPSS 20.0 for windows,

diperoleh nilai t hitung (2,159) > t tabel (1,980) dan Sig. (0,33) < 0,05.

Ketaatan pada peraturan perundangan pun menjadi pertimbangan atas keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Di Indonesia, peraturan-peraturan perundangan tentang keuangan negara diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang (UU), Keputusan Presiden (Keppres), dan peraturan pelaksanaan lainnya. Soleman (2007:104) mengkaitkan akuntansi dan hukum dalam pandangannya mengenai akuntansi dengan lingkungannya. Menurutnya terdapat delapan elemen lingkungan yang mempengaruhi akuntansi yaitu sistem akuntansi, sumber pendanaan, perpajakan, hubungan politik dan ekonomi, inflasi, tingkat perkembangan ekonomi, tingkat pendidikan, dan budaya dan juga ada pengaruh hukum dan perkembangan akuntansi.

Hingga saat ini, telah banyak undang-undang serta peraturan pemerintah yang diterbitkan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik, semakin taat pada peraturan perundangan maka Organisasi Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkan laporan keuangan kepada masyarakat yang bersifat transparansi kepada publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurazlina (2011), dan Zirman (2010) yang menyatakan bahwa Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil Pengujian Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah Sistem Pelaporan

berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari hasil perhitungan SPSS 20.0 for windows, diperoleh nilai t hitung (2,811) > t tabel (1,980) dan Sig. (0,46) < 0,05.

Agar dapat memantau hasil kerja pusat pertanggung jawaban, diperlukan sebuah sistem pelaporan. Dalam laporan harus ditunjukkan hasil kerja pusat pertanggung jawaban beserta anggarannya, sehingga dapat diketahui penyimpangan terhadap anggaran. Lebih bermanfaat laporan tersebut apabila disertai dengan analisis tentang penyebab timbulnya penyimpangan. Dapat dikatakan bahwa sistem pelaporan akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian manajemen.

BPKP (2011) beberapa ciri laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah mengerti (jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi, berdaya uji (*verifiable*), lengkap, netral, padat dan terstandarisasi (untuk yang rutin).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Paramitha (2016) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan seberapa besar persentase variabel-variabel independen. Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variabel independen

dalam menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen.

Diketahui nilai R Square sebesar 0,794. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 79,4 %. Sedangkan sisanya 20,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penyajian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian akuntansi, ketaatan peraturan perundangan dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) organisasi perangkat daerah kabupaten Rokan Hilir.

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel pengaruh sistem akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan wawancara yang mungkin dapat membantu dalam mengendalikan jawaban tiap responden.
2. Untuk penelitian selanjutnya agar ruang lingkup diperluas sehingga mungkin saja hasilnya berbeda.
3. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen yaitu Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Oleh karena itu, diharapkan pada penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama agar dapat menambahkan variabel yang lain yang mungkin dapat mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Soekrisno. 2011. *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anjarwati, Mei. 2012. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem*

Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada SKPD se-Kabupaten, Kota Tegal dan Kabupaten Pemalang). Under *Graduatesthesis*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

- Azlina, Nur dan Reynaldi Riantiarno. 2011. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Pekbis Jurnal*, Vol.3, No.3, November 2011: 560-568

BPKP, 2011, *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*

- Darma, E. S.2004. "Pengaruh Kejelasan Sasaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Daerah". *Te-sis*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM.

Emrinaldi Nur, DP. 2012. *Agency Theory & Corporate Governance*. Pusat Pengembangan Universitas Riau, Pekanbaru.

Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika: Teori Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- _____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hery. 2009. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Kencana.
- LAN No.239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Lumenta, Agnestasia Laura, Jenny Morasa dan Lidia Mawikere. 2016. Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kabupaten Minahasa Selatan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi.. Vol.4 No.3 September 2016, Hal. 135-146. ISSN 2303-1174. *Jurnal. Minahasa : Universitas Sam Ratulangi*.
- Paramitha, Ida Ayu Made Dwiki, Gayatri. 2016. Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik Dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia. Vol.16.3. September (2016): 2457-2479. Issn: 2302-8556. *Jurnal. Universitas Udayana*.
- Putra, Yudhi Pratama. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Payakumbuh). *Jurnal. Pekanbaru : Universitas Riau*.
- Setiawan, Eko. 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntabilitas dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah(studi kab.pelalawan). *Jurnal. Pekanbaru: Universitas Riau*.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Zirman, 2010. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas keuangan, Motivasi Kerja dan Ketaatan Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
- Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

[Http://Pekanbaru.Bpk.Go.Id/?P=21858](http://Pekanbaru.Bpk.Go.Id/?P=21858)

[Http://Www.Inforohil.Com/2017/08/Inilah-Puluhan-Catatan-Dprd-](http://Www.Inforohil.Com/2017/08/Inilah-Puluhan-Catatan-Dprd-)

[Untuk-Lkpj-Bupati-Rohil-Tahun-2016.Htm](#)

[Http://www.riau.go.id/home/content/2017/03/21/6446-menpan-umumkan-hasil-kinerja-pemerintah-daerah-di](http://www.riau.go.id/home/content/2017/03/21/6446-menpan-umumkan-hasil-kinerja-pemerintah-daerah-di)